



Published by Yayasan Yetti Afrida Center Bengkulu

pISSN | eISSN

Vol. 1 No. 1 Oktober 2026 | Pages 57–70

<https://yettiafridacenter.com/tautan>

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Kecerdasan Buatan dan Dinamika Kehidupan Sosial: Kajian tentang Perubahan Perilaku, Etika Digital, dan Relasi Antarmanusia

Syukraini Ahmad

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email: syukrainiahmad@yahoo.co.id

Abstract

Purpose: This article examines how artificial intelligence reshapes everyday social behaviour, digital ethics, and interpersonal relationships, with attention to the unequal distribution of opportunities and risks.

Design/Methodology: The study adopts a qualitative conceptual literature review. It compares scholarship on algorithmic governance, mediated communication, digital labour, privacy, sociotechnical systems, and responsible AI. No primary interviews or survey data are claimed.

Findings: The synthesis identifies interconnected mechanisms involving automated recommendations, delegated decisions, conversational agents, datafication, and asymmetries of power. Their consequences depend on institutional accountability, digital literacy, social context, and human oversight.

Practical Implications: Universities, families, regulators, and technology providers should strengthen critical AI literacy, data protection, inclusive access, transparency, and opportunities for meaningful human interaction.

Originality/Value: The article proposes a Context–Agency–Accountability–Relationship framework for analysing when AI supports human flourishing and when it erodes trust or autonomy.

Keywords: artificial intelligence; social behaviour; digital ethics; human relationships; algorithmic governance; digital literacy

Received: 06/09/2026

Accepted: 13/09/2026

Published: 12/10/2026

A. INTRODUCTION (PENDAHULUAN)

Kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari praktik sosial yang sebelumnya dijalankan sepenuhnya melalui pertimbangan manusia. Rekomendasi video, pencarian informasi, penyaringan lamaran kerja, asisten virtual, dan sistem pelayanan publik menghubungkan pilihan sehari-hari dengan model komputasi. Perubahan ini bukan hanya persoalan kecepatan teknologi. Ketika algoritma membantu menentukan informasi yang terlihat dan layanan yang tersedia, hubungan antara individu, institusi, dan pengetahuan ikut berubah. Manusia tetap mengambil keputusan, tetapi pilihan yang tersedia sering dibentuk oleh klasifikasi dan peringkat yang tidak tampak di permukaan (Gillespie, 2014; Kitchin, 2017).

Dalam perspektif ilmu sosial, kecerdasan buatan tidak dapat diperlakukan sebagai kekuatan yang bergerak terpisah dari masyarakat. Model dilatih melalui data yang dihasilkan dalam hubungan sosial dan diterapkan di dalam organisasi yang memiliki kepentingan, aturan, serta keterbatasan. Akibatnya, teknologi yang serupa dapat membantu pembelajaran personal pada suatu lingkungan sekaligus memperbesar ketimpangan pada lingkungan lain. Perspektif sosioteknis menempatkan desain sistem, budaya pengguna, institusi, dan distribusi sumber daya sebagai unsur yang saling membentuk. Pemahaman seperti ini menghindari dua kesimpulan berlebihan: bahwa teknologi

selalu menyelesaikan masalah sosial, atau bahwa seluruh interaksi dengan mesin pasti merusak kemanusiaan (Winner, 1980; UNESCO, 2021).

Pertanyaan sentral artikel ini mencakup bagaimana penggunaan AI mengubah kebiasaan sosial, kapan otomatisasi memengaruhi otonomi dan tanggung jawab, serta bagaimana relasi antarmanusia dapat dipertahankan saat komunikasi semakin banyak dimediasi sistem prediktif. Pembahasan juga memberi perhatian pada konteks Indonesia yang ditandai keragaman bahasa, norma keluarga, akses digital, dan kapasitas kelembagaan. Artikel bertujuan menghasilkan sintesis yang relevan bagi pendidikan tinggi, ruang publik digital, organisasi kerja, serta tata kelola teknologi yang menghormati hak dan martabat manusia.

B. LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA)

1. Kecerdasan Buatan sebagai Sistem Sosioteknis

AI mencakup teknik komputasi yang memungkinkan sistem melakukan tugas seperti pengenalan pola, prediksi, klasifikasi, dan produksi keluaran bahasa atau gambar. Namun, istilah kecerdasan perlu digunakan secara hati-hati. Keberhasilan sebuah model pada tugas tertentu tidak otomatis berarti sistem memiliki pemahaman manusia, empati, atau tanggung jawab moral. Dalam masyarakat, dampak algoritma muncul melalui praktik penggunaan: siapa yang menetapkan tujuan, data apa yang tersedia, indikator mana yang dianggap penting, serta siapa yang dapat menentang hasilnya (Crawford, 2021).

Pendekatan sosioteknis memandang keluaran AI sebagai bagian dari rangkaian keputusan organisasi dan sosial. Sebuah rekomendasi konten, misalnya, dipengaruhi oleh tujuan bisnis platform, pola interaksi pengguna, kebijakan moderasi, serta standar keberhasilan yang dipilih pengembang. Oleh karena itu, analisis perubahan sosial perlu menelaah institusi yang mengoperasikan teknologi, bukan hanya kecanggihan model. Pandangan ini membantu menjelaskan mengapa manfaat AI dapat berbeda menurut umur, literasi, posisi ekonomi, kemampuan bahasa, dan akses terhadap proses koreksi.

2. Masyarakat Jaringan, Datafikasi, dan Kekuasaan Algoritmik

Masyarakat jaringan menempatkan aliran informasi sebagai unsur penting pengorganisasian kehidupan ekonomi dan sosial (Castells, 2010). Dalam lingkungan semacam itu, aktivitas manusia meninggalkan jejak digital yang kemudian diubah menjadi kategori dan prediksi. Proses datafikasi menawarkan manfaat bagi analisis pola sosial, tetapi juga memungkinkan pengawasan dan pemprofilan dalam skala yang sulit dipahami individu. Kategori yang dianggap objektif dapat

menyederhanakan pengalaman manusia dan mengabaikan kelompok dengan representasi data yang terbatas.

Gillespie (2014) menunjukkan bahwa algoritma relevan secara sosial karena berperan menata visibilitas informasi. Dalam praktiknya, seseorang tidak bertemu seluruh isi internet dengan peluang sama: hasil pencarian, linimasa, dan rekomendasi telah melalui seleksi. Seleksi tersebut dapat membantu menemukan pengetahuan yang bermanfaat tetapi juga membatasi perspektif apabila sistem hanya mengulang preferensi masa lalu. Penting untuk membedakan kemungkinan pengaruh dari bukti empiris: tidak setiap rekomendasi menghasilkan polarisasi, dan pengalaman pengguna bergantung pada cara menggunakan serta lingkungan sosialnya.

3. Etika Digital, Hak, dan Tanggung Jawab

Etika digital membahas bagaimana hak, kewajiban, dan prinsip keadilan diterapkan dalam teknologi informasi. Pada AI, isu utama meliputi privasi, diskriminasi, keamanan, transparansi, keterjelasan penjelasan, dan kesempatan memperoleh pemulihan ketika keputusan keliru. Floridi dan Cowls (2019) membahas prinsip-prinsip etis yang dapat digunakan untuk menilai sistem AI, sementara rekomendasi UNESCO (2021) menekankan hak asasi manusia dan pengawasan sepanjang siklus teknologi.

Prinsip etika tidak cukup ditempelkan pada dokumen kebijakan. Perlindungan nyata memerlukan pembagian tanggung jawab antara pembuat model, organisasi pengguna, dan penyedia layanan. Ketika sistem dipakai untuk mendukung keputusan tentang pendidikan, pembiayaan, atau pekerjaan, pihak terdampak perlu memahami bahwa sistem digunakan, mengetahui jalur keberatan, serta dapat meminta peninjauan manusia. Transparansi yang hanya berupa penjelasan teknis panjang tidak selalu bermakna bagi pengguna; bahasa dan saluran penjelasan harus sesuai kebutuhan mereka.

4. Relasi Manusia dan Teknologi Percakapan

Kemampuan model percakapan untuk merespons bahasa alami dapat membuat interaksi dengan AI terasa akrab. Pengguna memanfaatkan asisten virtual untuk mencari ide, belajar, mengatur tugas, atau memperoleh tanggapan ketika tidak mudah menghubungi orang lain. Fenomena ini perlu dianalisis tanpa menyamakan simulasi percakapan dengan kedekatan sosial yang timbal balik. Hubungan manusia melibatkan komitmen, tanggung jawab, dan kemampuan memahami konteks bersama yang tidak otomatis hadir pada layanan otomatis (Turtle, 2011).

Sisi lain dari kemudahan itu ialah kecenderungan mempercayai keluaran yang terdengar lancar. Sistem generatif dapat menghasilkan pernyataan keliru tetapi disusun dengan bahasa meyakinkan. Bender dkk. (2021) mengingatkan perlunya memahami keterbatasan model bahasa dan kondisi

produksinya. Dalam kegiatan akademik maupun komunikasi pribadi, verifikasi sumber dan pengungkapan penggunaan AI menjadi penting agar kepercayaan tidak digantikan oleh kesan kefasihan.

C. METHOD (METODE PENELITIAN)

Artikel menggunakan pendekatan kajian pustaka kualitatif-konseptual dengan sintesis tematik. Bahan analisis meliputi karya teori masyarakat jaringan, kajian tata kelola algoritmik, literatur etika AI, studi komunikasi manusia-komputer, serta pedoman internasional terkait AI yang bertanggung jawab. Literatur dipilih karena relevansi terhadap hubungan antara perubahan perilaku, pembentukan norma digital, dan kualitas relasi sosial. Kajian tidak menggunakan responden, wawancara, observasi lapangan, atau statistik primer yang dikumpulkan penulis.

Proses sintesis dilakukan melalui identifikasi konsep, pengelompokan masalah, perbandingan perspektif, dan penyusunan kerangka interpretatif. Tema awal mencakup personalisasi, pengambilan keputusan otomatis, kerja, pendidikan, identitas, privasi, kepercayaan, serta hubungan sosial. Setiap tema kemudian ditelaah dari sisi peluang, kerentanan, dan kondisi kelembagaan yang dapat mengubah dampaknya. Teori dan laporan normatif tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa satu peristiwa tertentu telah terjadi pada seluruh masyarakat Indonesia.

Keabsahan argumen dijaga dengan membedakan klaim teoretis, temuan penelitian terdahulu, dan rekomendasi yang dirumuskan penulis. Kajian pustaka dapat menghasilkan model dan pertanyaan penelitian, tetapi tidak dapat mengukur ukuran efek atau membuktikan hubungan sebab-akibat pada satu populasi. Penelitian empiris lanjutan perlu menguji apakah mekanisme yang diusulkan berlaku bagi mahasiswa, pekerja, keluarga, atau komunitas dengan karakteristik dan pola akses berbeda.

D. RESULTS AND DISCUSSION (HASIL DAN PEMBAHASAN)

1. Perubahan Kebiasaan Mengakses Pengetahuan

Kemampuan AI menyajikan jawaban secara langsung mengubah cara orang memulai pencarian informasi. Sebelumnya pengguna sering perlu membuka beberapa sumber, membandingkan dokumen, lalu menyusun kesimpulan. Kini model generatif dapat menghasilkan ikhtisar dalam hitungan detik. Perubahan tersebut menurunkan hambatan awal memperoleh penjelasan, terutama bagi pengguna yang membutuhkan bantuan menyederhanakan konsep. Namun, ringkasan yang mudah dibaca dapat menimbulkan kesan bahwa proses penelusuran sumber telah selesai, padahal model mungkin menghilangkan konteks penting atau membuat rujukan yang tidak ada.

Dalam pendidikan, kegunaan AI bukan hanya untuk mempercepat penyelesaian tugas, melainkan untuk menyediakan umpan balik awal dan membantu eksplorasi gagasan. Risiko timbul apabila siswa mengganti proses berpikir dengan penyalinan jawaban otomatis. Pendidik dapat merancang tugas yang menuntut perbandingan argumen, verifikasi kutipan, dan refleksi atas keterbatasan keluaran. Dengan demikian, literasi AI perlu memasukkan pemahaman tentang ketidakpastian serta tanggung jawab pengguna terhadap informasi yang dibagikan (UNESCO, 2023).

Perubahan perilaku pencarian juga memiliki dimensi kepercayaan. Individu cenderung menilai jawaban cepat sebagai efisien, tetapi mutu informasi perlu diuji melalui bukti yang dapat ditelusuri. Ketika seorang mahasiswa menerima penjelasan tentang kebijakan atau data penelitian, ia perlu memeriksa sumber primer, periode penerbitan, dan kesesuaian konteks. Kebiasaan bertanya kembali kepada sistem bisa berguna untuk menguji alasan, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian independen. Penguatan kemampuan ini membantu pengguna menjadikan AI alat bantu berpikir, bukan otoritas pengetahuan tunggal.

2. Personalisasi, Pilihan, dan Otonomi Individu

Sistem rekomendasi menyesuaikan konten berdasarkan perilaku yang telah tercatat. Personalisasi dapat mengurangi waktu pencarian dan memperkenalkan sumber yang relevan, tetapi memiliki keterbatasan ketika preferensi masa lalu dianggap sebagai gambaran tetap tentang seseorang. Individu dapat kehilangan kesempatan melihat topik baru bila daftar rekomendasi terlalu sempit. Karena itu, kualitas pilihan tidak cukup ditentukan oleh tingkat kecocokan prediksi, tetapi juga oleh kemampuan pengguna keluar dari pola yang telah dibentuk sistem.

Otonomi merupakan kemampuan menetapkan tujuan dan menilai pilihan secara bermakna. Pada aplikasi digital, otonomi dipengaruhi kemudahan mengubah rekomendasi, transparansi pengumpulan data, dan tersedia tidaknya jalur alternatif. Ketika pengguna hanya diberi pilihan menerima seluruh pemrosesan data atau kehilangan akses layanan, persetujuan formal tidak selalu mencerminkan kebebasan substantif. Zuboff (2019) mengingatkan bahwa pengumpulan data komersial dapat terkait struktur kekuasaan yang tidak seimbang.

Perbaikan desain dapat dilakukan melalui kontrol personalisasi, kesempatan menghapus jejak, dan penjelasan yang sederhana mengenai mengapa konten ditampilkan. Pengguna juga memerlukan keterampilan membandingkan beberapa sumber. Interaksi teknologi yang bertanggung jawab tidak menuntut setiap orang memahami kode algoritma, tetapi memastikan adanya kemampuan praktis untuk memilih, memahami risiko, dan menolak pemrosesan yang tidak diperlukan.

3. Perubahan Komunikasi dan Ekspresi Diri

AI generatif memungkinkan individu menyusun pesan, menerjemahkan percakapan, dan memperbaiki gaya tulisan. Kemampuan ini dapat membantu orang yang mengalami hambatan bahasa atau membutuhkan dukungan dalam komunikasi formal. Namun, ketika seluruh pesan dirancang secara otomatis, penerima dapat kesulitan membedakan ekspresi pribadi dari hasil sistem. Persoalan etisnya bukan semata penggunaan alat, melainkan apakah komunikasi memberi kesan yang menyesatkan tentang pengalaman, komitmen, atau kemampuan pengirim.

Dalam interaksi antarmanusia, pilihan kata membawa konsekuensi emosional dan sosial. Sebuah permintaan maaf yang ditulis AI mungkin terdengar sopan, tetapi pemulihan kepercayaan tetap memerlukan perubahan perilaku pengirim. Demikian pula pesan dukungan yang disusun otomatis dapat menjadi pintu awal komunikasi tanpa menggantikan kehadiran nyata. Relasi yang sehat membutuhkan perhatian terhadap maksud, tanggung jawab atas pernyataan, serta kesempatan berdialog jika terjadi kesalahpahaman.

Di ruang publik digital, produksi konten otomatis dapat memperbesar volume pesan dan mempercepat penyebaran narasi. Kondisi ini memberi peluang bagi komunitas kecil untuk menyampaikan informasi dengan sumber daya terbatas, tetapi juga memudahkan spam, impersonasi, dan manipulasi. Karena itu, norma pengungkapan yang proporsional diperlukan, khususnya untuk konten sintetis yang secara wajar dapat disalahpahami sebagai pengalaman langsung atau dokumentasi autentik.

4. Kepercayaan, Bias, dan Keadilan Algoritmik

Keputusan berbasis AI kerap memperoleh legitimasi karena dianggap berasal dari perhitungan objektif. Padahal, kualitas sebuah model sangat dipengaruhi komposisi data, pilihan variabel, definisi keberhasilan, dan proses implementasi. Barocas dan Selbst (2016) menunjukkan bahwa penggunaan data dapat memunculkan efek diskriminatif bahkan ketika suatu prosedur tidak secara eksplisit memasukkan kategori yang dilindungi. Karena itu, klaim netralitas teknologi harus diperiksa melalui dampak, bukan semata niat perancang.

Dalam layanan pendidikan atau administrasi, risiko timbul ketika skor otomatis digunakan tanpa ruang untuk penjelasan kontekstual. Seseorang dapat diperlakukan tidak adil karena data tidak lengkap atau pola historis mencerminkan ketimpangan lama. Audit berkala, analisis kinerja antar-kelompok, dan mekanisme banding yang dapat diakses merupakan cara memperkecil risiko tersebut. Tidak semua keputusan memerlukan otomatisasi penuh; untuk keputusan berdampak besar, manusia perlu memiliki tanggung jawab dan kewenangan nyata dalam peninjauan.

Kepercayaan publik bertumbuh bukan karena organisasi mengklaim algoritmanya akurat, tetapi karena warga memahami standar layanan dan bisa memperoleh koreksi saat terjadi kesalahan. Sistem yang memproduksi alasan teknis rumit tanpa jalur respons praktis dapat gagal membangun legitimasi sosial. Penjelasan harus disertai dokumentasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap orang yang menerima dampaknya.

5. Privasi, Pemantauan, dan Hak atas Data

Data pribadi dapat digunakan untuk melatih, menguji, dan menyesuaikan layanan digital. Namun, banyak pengguna tidak mengetahui bahwa percakapan, unggahan, atau perilaku aplikasi dapat menjadi masukan dalam proses analitik. Kesenjangan informasi menciptakan tantangan persetujuan dan kontrol. Nilai perlindungan privasi tidak berhenti pada tindakan menyembunyikan rahasia; privasi juga berkaitan dengan kemampuan seseorang mempertahankan ruang bereksperimen, menjalin relasi, dan berubah tanpa selalu dipantau.

Nissenbaum (2010) menempatkan privasi dalam kerangka integritas kontekstual: informasi yang layak dibagi dalam satu hubungan belum tentu pantas dialihkan ke hubungan lain. Contohnya, percakapan mahasiswa dengan layanan pendampingan tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai materi promosi. Organisasi perlu menetapkan tujuan pengumpulan yang jelas, membatasi penyimpanan, menjaga keamanan, dan menjelaskan akses pihak ketiga.

Ketika AI dipakai untuk pengawasan aktivitas belajar atau pekerjaan, organisasi perlu menilai proporsionalitas. Pemantauan terus-menerus dapat menimbulkan tekanan dan mengurangi rasa percaya, meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi. Alternatif yang lebih bertanggung jawab ialah pengukuran berbasis tujuan yang disepakati, penggunaan data minimum, dan kesempatan bagi pihak terdampak mengajukan keberatan.

6. Interaksi dengan Asisten Percakapan dan Kedekatan Sosial

Asisten percakapan menawarkan respons yang cepat dan mudah diakses. Bagi sebagian pengguna, sistem dapat membantu menstrukturkan pikiran, melatih bahasa, atau mempersiapkan percakapan sulit. Namun, penggunaan intensif memunculkan pertanyaan tentang batas antara bantuan instrumental dan hubungan sosial. Sistem tidak memiliki kewajiban timbal balik seperti anggota keluarga, sahabat, atau tenaga profesional. Oleh sebab itu, pengalaman merasa didengarkan oleh AI perlu dibedakan dari jaminan dukungan manusia yang berkelanjutan.

Turkle (2011) mengajukan perhatian terhadap hubungan manusia dengan teknologi yang meniru kehadiran sosial. Dalam praktiknya, dampak dapat berbeda menurut kebutuhan dan pola penggunaan. Seseorang mungkin menggunakan AI untuk menyusun pertanyaan sebelum

berkonsultasi dengan dosen; orang lain mungkin menunda pembicaraan penting karena jawaban mesin terasa lebih mudah. Menetapkan pengaruhnya memerlukan penelitian lapangan yang membedakan fungsi, durasi, situasi, dan ketersediaan relasi pendukung.

Pada kelompok rentan, desain sistem harus menghindari klaim menyesatkan tentang kapasitasnya. Layanan percakapan dapat menyediakan informasi umum, tetapi tidak semestinya berpura-pura menggantikan tenaga profesional dalam situasi yang membutuhkan evaluasi khusus. Pendidikan tentang batas kemampuan mesin dan rujukan kepada layanan manusia akan membantu menempatkan teknologi pada peran yang lebih aman.

7. Perubahan Kerja, Keterampilan, dan Hubungan Organisasi

AI mengotomasi sebagian aktivitas pengolahan dokumen, klasifikasi, penjadwalan, dan layanan pelanggan. Dampaknya tidak selalu sama dengan hilangnya seluruh jabatan. Suatu pekerjaan biasanya terdiri atas beberapa tugas, sehingga perubahan dapat berupa redistribusi tanggung jawab, penambahan kebutuhan verifikasi, atau munculnya peran baru. Analisis organisasi perlu mengukur bagaimana teknologi mengubah kualitas pekerjaan, kesempatan belajar, keamanan penghasilan, dan posisi tawar pekerja.

Dalam konteks sosial, otomatisasi juga mengubah hubungan antara pekerja dan pengguna layanan. Jawaban yang dibuat mesin dapat mempercepat proses administrasi, tetapi pelanggan mungkin membutuhkan penjelasan manusia ketika kasusnya tidak biasa. Organisasi sebaiknya menetapkan batas eskalasi ke petugas, menghindari pengurangan layanan manusia secara membabi buta, serta menyediakan pelatihan yang berkesinambungan. Kemampuan mengoperasikan AI tanpa memahami kesalahan dan implikasi etikanya belum cukup untuk disebut kesiapan digital.

Kepemimpinan organisasi perlu melibatkan pekerja sejak perencanaan implementasi. Dialog tentang tujuan, dampak terhadap beban kerja, dan indikator penilaian akan membantu mengurangi ketidakpastian. Ketika sistem digunakan untuk menilai produktivitas, akurasi pengukuran dan hak pekerja memperoleh penjelasan perlu dijamin. Manfaat efisiensi seharusnya dibaca bersama kualitas lingkungan kerja dan keadilan distribusi hasil.

8. Pendidikan Tinggi dan Integritas Akademik

Perguruan tinggi menghadapi peluang dan tantangan baru ketika AI dapat menulis ringkasan, menghasilkan kode, atau menjelaskan soal. Mahasiswa memperoleh bantuan untuk mengatasi kebuntuan awal, sedangkan dosen dapat memanfaatkannya untuk menyusun variasi latihan. Namun, kemudahan produksi teks dapat menyamarkan tingkat penguasaan konsep sebenarnya. Karena itu,

penilaian perlu memberi ruang bagi argumentasi lisan, portofolio proses, dan bukti bahwa mahasiswa memahami dasar jawabannya.

Integritas akademik mengharuskan penulis bertanggung jawab atas isi, sitasi, dan keaslian hasil. Penggunaan AI tidak mengalihkan tanggung jawab verifikasi kepada perangkat. Ketika model menyarankan referensi, pengguna perlu memeriksa keberadaan sumber dan relevansi pernyataannya. Dalam penelitian, data hasil survei atau wawancara tidak boleh direkayasa hanya untuk melengkapi sebuah naskah. Pedoman UNESCO (2023) mendorong pendekatan pendidikan yang mempertimbangkan pembelajaran manusia dan perlindungan data.

Lembaga pendidikan sebaiknya menyusun kebijakan penggunaan AI yang jelas tetapi adaptif. Larangan yang terlalu umum dapat menutup kesempatan pembelajaran kritis, sedangkan kebebasan tanpa panduan meningkatkan risiko penyalahgunaan. Aturan perlu menjelaskan kegiatan yang boleh dibantu sistem, informasi yang tidak boleh dimasukkan, cara mengungkapkan bantuan, dan bentuk tanggung jawab akademik yang tetap melekat pada penulis.

9. Disinformasi Sintetis dan Kepercayaan Publik

Sistem generatif dapat menghasilkan teks, gambar, dan suara yang menyerupai materi buatan manusia. Peluang tersebut bermanfaat bagi pendidikan kreatif serta akses komunikasi, tetapi berpotensi digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau meniru identitas seseorang. Dalam masyarakat yang bergantung pada distribusi berita cepat, biaya produksi konten menyesatkan yang rendah dapat meningkatkan beban verifikasi pada publik dan lembaga pers.

Upaya menghadapi disinformasi tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan individu melihat ciri visual palsu. Kemampuan model berubah dan tanda-tanda teknis sering tidak stabil. Penguatan ekosistem informasi memerlukan mekanisme pelacakan sumber, prosedur koreksi publik, pendidikan literasi media, dan kerja sama platform dengan pemeriksa fakta. Pada peristiwa sensitif, informasi penting perlu dicek melalui saluran resmi dan sumber independen sebelum disebarkan.

Kepercayaan sosial dapat terkikis apabila setiap rekaman dianggap mudah dipalsukan. Oleh karena itu, kebijakan teknologi perlu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap penipuan. Prosedur penyelesaian keberatan, transparansi moderasi, serta dokumentasi yang menjaga privasi perlu dikembangkan agar penanganan informasi menyesatkan tidak menjadi alasan pembatasan suara secara sewenang-wenang.

10. Ketimpangan Akses, Bahasa, dan Representasi Budaya

Keberhasilan AI dalam bahasa tertentu tidak menjamin mutu yang sama untuk semua bahasa dan kelompok budaya. Masyarakat yang menggunakan bahasa dengan sumber data terbatas mungkin menerima jawaban lebih pendek, kurang tepat, atau tidak peka terhadap konteks lokal. Kondisi ini penting dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia. Pengembangan sistem perlu memperhatikan variasi kosakata, praktik sosial, dan konteks pelayanan yang tidak selalu tertangkap oleh data dominan.

Akses juga dipengaruhi perangkat, biaya internet, keterampilan, serta kebutuhan disabilitas. Ketika sekolah atau layanan publik mengandaikan semua pengguna mampu menggunakan aplikasi yang sama, teknologi berisiko memperbesar pengecualian. Prinsip inklusi menuntut ketersediaan saluran non-digital, dukungan pendampingan, serta desain antarmuka yang dapat diakses. UNESCO (2021) menempatkan keadilan dan non-diskriminasi sebagai unsur penting tata kelola AI.

Komunitas lokal seharusnya dilibatkan dalam evaluasi relevansi budaya keluaran model. Pelibatan bukan sekadar menyediakan data, tetapi mencakup hak menentukan penggunaan pengetahuan dan batas publikasinya. Pengembangan teknologi yang menghormati keragaman membantu mencegah anggapan bahwa ukuran keberhasilan yang berlaku pada satu masyarakat dapat diterapkan begitu saja pada masyarakat lain.

11. Matriks Peluang, Risiko, dan Mitigasi Sosial

Analisis terhadap berbagai bidang menunjukkan bahwa manfaat AI muncul bersama risiko yang berbeda. Pembelajaran menghadirkan bantuan memahami materi tetapi juga kemungkinan ketergantungan; komunikasi menjadi lebih cepat tetapi dapat kehilangan keaslian; organisasi memperoleh efisiensi tetapi menghadapi risiko pengawasan berlebihan. Matriks berikut disusun sebagai sintesis konseptual. Isinya bukan ringkasan jumlah responden atau pengukuran dampak empiris.

Pembacaan matriks perlu mempertimbangkan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Satu solusi tidak selalu cocok pada seluruh situasi. Pengaturan eksplisit, pelatihan, peninjauan manusia, serta hak untuk tidak memakai otomasi dalam kasus tertentu dapat menjadi kombinasi penting untuk menjaga kualitas pengalaman sosial.

Ruang sosial	Peluang utama	Risiko dan mitigasi
Pembelajaran	Umpan balik dan akses	Ketergantungan; verifikasi sumber dan asesmen proses

Komunikasi	Terjemahan dan bantuan menulis	Manipulasi identitas; keterbukaan dan tanggung jawab
Kerja	Efisiensi tugas rutin	Pengawasan berlebih; dialog pekerja dan audit
Layanan publik	Waktu respons lebih cepat	Kesalahan klasifikasi; banding dan tinjauan manusia
Ruang informasi	Menemukan pengetahuan	Disinformasi; literasi media dan pelacakan sumber

Sumber: sintesis konseptual penulis dari UNESCO (2021), Gillespie (2014), Crawford (2021), dan Nissenbaum (2010).

12. Kerangka Konteks–Agensi–Akuntabilitas–Relasi

Artikel ini menawarkan empat dimensi untuk membaca dampak sosial kecerdasan buatan. Konteks mencakup lingkungan budaya, akses, tujuan organisasi, dan bentuk penggunaan. Agensi merujuk pada kemampuan individu memahami, menerima, menolak, atau mengoreksi rekomendasi. Akuntabilitas mencakup siapa yang bertanggung jawab ketika sistem menghasilkan kesalahan. Relasi menunjuk kualitas hubungan, kepercayaan, dan kerja sama manusia yang terbentuk atau berubah selama penggunaan.

Dimensi tersebut tidak berdiri sendiri. Konteks yang lemah, misalnya ketimpangan akses dan minimnya informasi, dapat membatasi agensi. Akuntabilitas yang jelas dapat memperkuat kepercayaan karena pengguna memiliki jalur pemulihan. Kualitas relasi kemudian perlu dilihat melalui pengalaman nyata, bukan sekadar jumlah interaksi yang dilakukan melalui aplikasi. Dengan cara ini, pertanyaan penelitian bergeser dari apakah AI baik atau buruk menuju kondisi apa yang menjadikan dampaknya membantu manusia.

Secara metodologis, kerangka dapat diuji melalui wawancara mendalam, survei literasi AI, evaluasi antarmuka, serta kajian kebijakan organisasi. Indikator agensi dapat berupa kemampuan mengubah preferensi dan mengajukan keberatan; akuntabilitas dapat dinilai dari mekanisme koreksi; sedangkan kualitas relasi memerlukan penilaian terhadap rasa dipercaya, kesempatan berdialog, dan bantuan manusia ketika dibutuhkan. Seluruh indikator masih perlu diuji validitasnya pada konteks penelitian spesifik.

13. Rekomendasi Tata Kelola pada Keluarga dan Komunitas

Keluarga dapat berperan membangun kebiasaan menggunakan AI secara reflektif melalui dialog, bukan hanya larangan. Orang tua dan anggota keluarga perlu membicarakan jenis informasi yang layak dimasukkan ke layanan digital, cara memeriksa jawaban, dan alasan perlunya menjaga percakapan tatap muka. Anak muda dapat membantu keluarga memahami teknologi, sementara

anggota yang lebih tua memberi pengalaman tentang konsekuensi sosial dan tanggung jawab komunikasi.

Komunitas dapat menyelenggarakan lokakarya literasi AI yang berangkat dari masalah sehari-hari, misalnya memeriksa pesan penipuan, menyusun informasi layanan, dan memverifikasi gambar yang beredar. Kegiatan yang baik tidak sekadar mengenalkan fitur produk, tetapi melatih peserta mempertanyakan sumber, meminta persetujuan sebelum membagikan data, dan mengetahui saluran pengaduan jika terjadi kerugian. Pendekatan ini lebih inklusif bila materi tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami.

Di tingkat layanan publik, praktik yang bertanggung jawab mencakup pemberitahuan penggunaan AI, penilaian risiko, dokumentasi keputusan penting, dan hak masyarakat berbicara dengan petugas. Kolaborasi dengan warga dapat membantu menemukan kesalahan yang tidak terlihat pada pengujian teknis. Evaluasi sebaiknya menilai bukan hanya kecepatan, tetapi juga kejelasan informasi, rasa dihargai, dan kemampuan kelompok rentan memperoleh layanan.

14. Arah Penelitian Empiris di Indonesia

Penelitian berikutnya perlu memisahkan hubungan antara intensitas penggunaan AI dan kualitas hasil sosial. Seseorang yang memakai AI setiap hari untuk memeriksa tata bahasa mempunyai pola pengalaman berbeda dari pengguna yang menyerahkan keputusan penting sepenuhnya kepada sistem. Studi empiris dapat membandingkan tujuan penggunaan, tingkat literasi, dukungan sosial, dan kemampuan mengoreksi kesalahan.

Rancangan longitudinal berguna untuk menilai perubahan kebiasaan dari waktu ke waktu, sementara etnografi digital membantu memahami makna penggunaan di dalam kelompok tertentu. Studi perbandingan antarwilayah dapat menguji apakah perbedaan akses, bahasa, atau budaya memengaruhi penerimaan teknologi. Pada organisasi pendidikan dan kerja, metode campuran dapat menghubungkan data praktik penggunaan dengan wawancara tentang pengalaman keadilan dan kepercayaan.

Etika penelitian perlu diperhatikan sejak awal. Peneliti hendaknya memperoleh persetujuan yang sah, membatasi pengumpulan data sensitif, menjaga kerahasiaan percakapan, dan tidak menerbitkan contoh yang memungkinkan identitas partisipan dilacak. Karena kajian sekarang tidak memiliki data primer, model yang diajukan belum dapat menetapkan besar pengaruh atau menyatakan pola tertentu mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

E. CONCLUSION (KESIMPULAN)

Kecerdasan buatan memengaruhi dinamika kehidupan sosial melalui perubahan cara mencari pengetahuan, memilih informasi, berkomunikasi, bekerja, dan membangun kepercayaan. Dampak teknologi tidak bersifat tunggal: personalisasi dapat membantu pengguna menemukan sumber relevan tetapi membatasi keragaman perspektif; asisten percakapan dapat mendukung aktivitas sehari-hari tetapi tidak otomatis menggantikan hubungan manusia; otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi namun memerlukan pengawasan dan kesempatan memperoleh koreksi.

Sintesis kajian menunjukkan bahwa isu etika digital harus diperlakukan sebagai bagian dari desain dan tata kelola, bukan sekadar imbauan individual. Perlindungan privasi, penanganan bias, transparansi yang bermakna, inklusi bahasa, serta akuntabilitas organisasi merupakan prasyarat bagi penggunaan AI yang menghormati martabat. Kerangka Konteks–Agensi–Akuntabilitas–Relasi menawarkan cara menilai dampak berdasarkan kondisi sosial dan kualitas hubungan, bukan berdasarkan kecanggihan teknis semata.

Artikel ini merupakan kajian pustaka konseptual tanpa survei maupun observasi primer. Karena itu, kesimpulannya berfungsi sebagai penjelasan teoretis dan usulan penelitian lebih lanjut, bukan bukti bahwa AI menyebabkan perubahan tertentu pada populasi yang telah diukur. Penguatan literasi kritis, evaluasi lintas disiplin, dan pelibatan masyarakat diperlukan agar kemajuan teknologi memperluas kemampuan manusia untuk memilih, berdialog, dan hidup bersama secara adil.

F. BIBLIOGRAPHY (DAFTAR PUSTAKA)

- Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big data's disparate impact. *California Law Review*, 104(3), 671–732.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of FAccT 2021*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.
- European Commission. (2019). *Ethics guidelines for trustworthy AI*. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence.
- Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1). <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>
- Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Eds.), *Media technologies* (pp. 167–194). MIT Press.
- Kitchin, R. (2017). Thinking critically about and researching algorithms. *Information, Communication & Society*, 20(1), 14–29. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1154087>
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2). <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>

- Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. New York University Press.
- OECD. (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. OECD. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown.
- Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. Basic Books.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? *Daedalus*, 109(1), 121–136.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.